

Memperkuat Benteng Keuangan: Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal

A. Indah Anggerwati¹ Hermin Hermin² Ernawati Ernawati³ Nur Asia⁴

^{1 2 3 4} Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: indahanggerwati2712@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the internal control system (SPI) implementation at the Polkes Kodam Makassar. This research uses a qualitative approach with a phenomenological design focusing on understanding the experiences, views, and perceptions of individuals related to the implementation of SPI in financial management. Participants in this study consisted of financial management officials, administrative staff, and other related parties who were directly involved in financial management at the Polkes Kodam Makassar. Data were collected through in-depth interviews and direct observation of the occurring processes. The results showed that the implementation of SPI at Polkes Kodam Makassar has met most of the standards set by the government, including safeguarding assets, accuracy of financial reports, and compliance with regulations. Nonetheless, the main challenge faced is that internal supervision has not been fully optimized, which has the potential to cause budget deviations. In addition, while financial information is readily available, the system for disseminating and understanding such information needs to be improved to make it more transparent and easily understood by all relevant parties. Improvements in these two aspects will strengthen accountability, transparency, and efficiency in the financial management of Polkes Kodam Makassar.

Kata Kunci: Accountability; Financial Management; Internal Control System.

Pendahuluan

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan suatu organisasi. SPI berperan untuk melindungi aset, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Manajer harus dapat mengevaluasi sistem internal karena mereka bertanggung jawab atas pengendalian internal dan pelaporan keuangan lembaga keuangan swasta dan pemerintah (Nursin & Tahun, 2023).

Pentingnya SPI juga tercermin dari kebijakan pemerintah yang mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam organisasi sektor publik, pengelolaan keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor swasta. Fokus utamanya adalah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan transparan (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas merupakan prinsip dimana sebuah organisasi atau pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (Ali & Saputra, 2023). Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik (Ngakil & Kaukab, 2020). Kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan kontrol internal yang ketat untuk meminimalkan risiko fraud, inefisiensi, dan penyimpangan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Anggerwati, 2022).

Pada organisasi pelayanan publik seperti Polkes Kodam Makassar, keberadaan SPI yang efektif sangat penting karena berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran negara maupun iuran peserta. Polkes Kodam Makassar memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi anggota TNI dan keluarganya.

Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada aspek operasional pelayanan kesehatan, tetapi juga pada pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung pada kelangsungan operasional Polkes dan kualitas layanan yang diberikan.

Namun, seperti banyak institusi pelayanan publik lainnya, Polkes Kodam Makassar juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan. Tantangan tersebut meliputi pengelolaan anggaran yang kompleks, potensi kesalahan dalam pencatatan, hingga risiko penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, implementasi SPI yang andal menjadi faktor kunci dalam mengatasi masalah tersebut dan memastikan pengelolaan keuangan yang efektif. Polkes Kodam Makassar sebagai institusi yang dikelola dengan dana publik perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internalnya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan dalam SPI dapat mengakibatkan berbagai permasalahan keuangan, seperti ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran, kekurangan pencatatan aset, hingga kebocoran dana. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas SPI di Polkes Kodam Makassar menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang telah diterapkan (Mardiasmo, 2018). Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi SPI pada Polkes Kodam Makassar. Pengelolaan keuangan yang kompleks serta potensi kesalahan dalam pencatatan, penyalahgunaan dana, dan risiko lainnya menjadi faktor-faktor yang dapat mengurangi efektivitas SPI. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana SPI yang diterapkan di Polkes Kodam Makassar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Tinjauan Teori

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindak penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, dan memastikan bahwa semua ketentuan ataupun peraturan hukum undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Siahaan & Muhidin, 2020). Sistem pengendalian internal (SPI) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Ekawati & Harahap, 2021).

Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. pengelolaan keuangan melibatkan pengambilan keputusan strategis dalam investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset organisasi untuk memaksimalkan nilai pemegang kepentingan (Brigham & Houston, 2021). Pengelolaan keuangan bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan penggunaan dana yang tepat guna (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Gibran et al., 2021). Akuntabilitas mencakup tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya publik dan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas tidak hanya penting untuk menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya organisasi.

Transparansi adalah hal yang mengacu kepada kondisi dimana seseorang, perusahaan, organisasi, instansi, ataupun Lembaga mampu menyediakan informasi secara terbuka kepada publik dengan tujuan agar publik ataupun orang-orang yang berkepentingan mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil serta dapat dipahami dengan mudah. Transparansi juga erat kaitannya dengan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dari suatu lembaga,

organisasi maupun pihak yang telah diberikan amanat. Transparansi mempunyai peranan yang sangat penting demi terciptanya kepercayaan publik kepada instansi atau lembaga yang diberikan amanat (Andreani & Syafina, 2022). Transparansi membantu mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab (Transparency International, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, makna, dan persepsi individu atau kelompok terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan esensi dari pengalaman subjektif yang dialami oleh subjek penelitian (Lukman, 2023). Pendekatan fenomenologi dipilih karena fokusnya pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif individu yang terlibat langsung dalam proses tersebut (Creswell, 2013). Partisipan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Polkes Kodam Makassar, termasuk pejabat pengelola keuangan, staf administrasi, serta pihak-pihak terkait lainnya yang berperan dalam implementasi dan evaluasi SPI. Partisipan yang dipilih yaitu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penerapan SPI di Polkes Kodam Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan partisipan.

Hasil

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPI, serta observasi langsung terhadap proses-proses yang terjadi, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

3.1. Penerapan SPI yang Sesuai dengan Standar

Sebagian besar informan menilai bahwa penerapan SPI di Polkes Kodam Makassar sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem pengendalian internal telah mencakup berbagai aspek, seperti pengamanan aset, akurasi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. SPI juga telah diterapkan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Pihak manajemen mengungkapkan bahwa mereka secara rutin melakukan evaluasi terhadap sistem ini untuk memastikan efektivitasnya, meskipun tidak dapat dipungkiri adanya beberapa tantangan yang masih dihadapi.

3.2. Tantangan dalam Implementasi SPI

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Polkes Kodam Makassar adalah terkait dengan pengawasan yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan mengatakan bahwa pengawasan internal perlu diperkuat untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran atau penyimpangan yang bisa terjadi. Meskipun laporan keuangan secara umum sudah cukup akurat, pengawasan yang lebih intensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

3.3. Persepsi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Sebagian besar informan sepakat bahwa SPI berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Polkes Kodam Makassar. Penggunaan SPI tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga menciptakan kepercayaan dari pihak eksternal seperti pemerintah dan masyarakat terhadap bagaimana dana publik digunakan. Meski demikian, masih ada kekhawatiran mengenai aksesibilitas informasi keuangan yang kadang-kadang tidak sepenuhnya terbuka atau dipahami oleh semua pihak terkait.

Beberapa staf tim administrasi menilai bahwa meskipun informasi keuangan sudah tersedia, sistem penyebaran dan pemahaman informasi tersebut perlu ditingkatkan. Mereka berharap adanya peningkatan dalam kapasitas sistem informasi yang dapat mengolah dan menyampaikan

data dengan lebih transparan dan terstruktur. Ini akan mempermudah pengambilan keputusan oleh manajemen dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Polkes Kodam Makassar sebagian besar sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. SPI mencakup berbagai aspek penting seperti pengamanan aset, akurasi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018), yang menyatakan bahwa dalam organisasi sektor publik, pengelolaan keuangan harus dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPI yang baik berperan untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan dengan cara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, SPI yang diterapkan di Polkes Kodam Makassar dapat dikatakan telah memenuhi sebagian besar prinsip yang ada dalam teori akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Tantangan yang dihadapi Polkes Kodam Makassar adalah terkait dengan pengawasan internal yang belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan sudah cukup akurat, pengawasan yang lebih intensif diperlukan untuk menghindari kebocoran anggaran atau penyimpangan lainnya. Penelitian sebelumnya oleh (Ali & Saputra, 2023) mengungkapkan bahwa dalam konteks akuntabilitas, pengawasan yang ketat adalah salah satu elemen kunci untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan. Pengawasan internal yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, sehingga perlu ada perbaikan dalam hal pengawasan untuk meningkatkan efektivitas SPI di Polkes Kodam Makassar.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Polkes Kodam Makassar. Meskipun sebagian besar informan sepakat bahwa SPI berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, masih ada kekhawatiran mengenai keterbukaan informasi keuangan yang terkadang tidak sepenuhnya dipahami oleh semua pihak terkait. Hal ini mendukung temuan (Mardiasmo, 2018) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik bukan hanya tentang penyediaan informasi keuangan, tetapi juga tentang memastikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem penyebaran informasi keuangan agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh seluruh pihak, baik internal maupun eksternal.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal (SPI) di Polkes Kodam Makassar telah memenuhi sebagian besar standar yang ditetapkan pemerintah, mencakup pengamanan aset, akurasi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah pengawasan internal yang masih belum maksimal, yang dapat menimbulkan risiko penyimpangan atau kebocoran anggaran. Selain itu, meskipun informasi keuangan sudah tersedia, sistem penyebaran dan pemahamannya masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Peningkatan pengawasan dan penyebaran informasi yang lebih baik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Polkes Kodam Makassar.

Referensi

Ali, H., & Saputra, F. (2023). *Pengaruh Transparan , Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance*. 2(2), 130–139.

- Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang*. 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>
- Anggerwati, A. I. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Fenomenologi (Pada Desa di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)*. 8(4), 343–350.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Ekawati, Y., & Harahap, A. P. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas terhadap Sistem Pengendalian Internal pada*. 1(1), 71–82.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka*. 1(3), 230–249.
- Lukman, S. D. S. (2023). *Economics and Digital Business Review Peran E-Wallet dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Mahasiswa*. 4(2), 45–58.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. 3(2), 92–107.
- Nursin, D., & Tahun, D. D. (2023). *Pengaruh Kualitas SDM , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi*. 7, 77–101.
- Siahaan, M., & Muhidin, A. T. (2020). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Jadi Pada PT . Denso Manufacturing Indonesia*. 03(September), 558–568.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. Retrieved From. www.transparency.org